

Jaringan Aktor dalam Komunikasi Publik Era Digital pada Kasus Penghinaan Penjual Es Teh oleh Miftah Maulana

Sari Riantika Damayanti¹, Zahwa Salsabila², Irwansyah Irwansyah³

^{1),2),3)} Universitas Indonesia

e-mail correspondent: sari.riantika@ui.ac.id

Received: 30-03-2026

Revised: 07-04-2026

Accepted: 17-04-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords:

Cancel Culture;
Communication Ethics;
Narrative Paradigm; Actor-
Network Theory; Digital
Communication

A sermon by Miftah Maulana, Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia for Religious Harmony and Development of Religious Facilities, who mocked an iced tea vendor named Sunhaji in November 2024, sparked widespread controversy in digital spaces. This study aims to analyze the actor-network formed in this case and examine how digital narratives shape public opinion and pressure. A qualitative approach with a descriptive-analytical case study method was employed. Data were collected through a literature review of journal articles, national media reports, and public discussions on social media. Analysis was conducted using Actor-Network Theory (ANT) and Fisher's Narrative Paradigm. The findings reveal that social media functioned as the primary amplification medium, connecting human actors—Miftah, Sunhaji, and netizens—with non-human actors including viral videos, algorithms, and social norms. The solidarity narrative toward Sunhaji met the criteria of narrative coherence and fidelity, making it widely accepted by the public, while Miftah's clarification failed to generate moral resonance. This case confirms that in the digital era, public communication is not merely the transfer of information but a navigation of complex narrative networks. The theoretical implications reinforce the relevance of ANT and the narrative paradigm in analyzing digital communication phenomena, while emphasizing the importance of digital literacy and communication ethics for public officials.

Abstrak

Ceramah Miftah Maulana, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, yang mengolok seorang penjual es teh keliling bernama Sunhaji pada November 2024, memunculkan kontroversi luas di ruang digital. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis jaringan aktor yang terbentuk dalam kasus tersebut serta mengkaji bagaimana narasi digital membentuk opini dan tekanan publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari artikel jurnal, berita media nasional, dan diskusi publik di media sosial. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Teori Jaringan Aktor (ANT) dan Paradigma Naratif Fisher. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai medium amplifikasi utama yang menghubungkan aktor manusia—Miftah, Sunhaji, dan warganet—dengan aktor non-manusia berupa video viral, algoritma, dan norma sosial. Narasi solidaritas terhadap Sunhaji berhasil memenuhi koherensi dan fidelitas naratif sehingga mudah diterima publik, sementara klarifikasi Miftah gagal menciptakan resonansi moral. Kasus ini mengonfirmasi bahwa di era digital, komunikasi publik tidak hanya merupakan transfer informasi, melainkan navigasi jaringan narasi yang kompleks. Implikasi teoritis penelitian ini memperkuat relevansi ANT dan paradigma naratif dalam menganalisis fenomena komunikasi digital, sekaligus menegaskan pentingnya literasi digital dan etika komunikasi bagi pejabat publik.

Kata kunci:

Budaya Pembatalan;
Etika Komunikasi;
Paradigma Naratif; Teori
Jaringan Aktor;
Komunikasi Digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah mengubah secara mendasar cara komunikasi publik berlangsung. Setiap pernyataan atau tindakan yang disampaikan oleh tokoh publik kini dapat dengan cepat menjadi sorotan masyarakat luas, melampaui batas ruang dan waktu. Media digital bertanggung jawab atas banyak perubahan paling fundamental dalam masyarakat selama seperempat abad terakhir (Schwarz et al., 2024). Media sosial, sebagai bentuk komunikasi berbasis internet, memungkinkan pengguna untuk melangsungkan percakapan, berbagi informasi, dan membentuk opini secara kolektif dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Fenomena ini berdampak langsung terhadap citra diri seseorang maupun institusi yang diwakilinya, baik secara positif maupun negatif. Platform seperti Twitter (X) memfasilitasi tiga karakteristik unik yang mendorong dinamika komunikasi digital, yakni kesederhanaan (*simplicity*), impulsivitas (*impulsivity*), dan ketidaksopanan (*incivility*) (Primaresti et al., 2022). Karakteristik ini menjadikan media sosial arena yang rentan terhadap eskalasi konflik narasi.

Kasus yang melibatkan Miftah Maulana, Utusan Khusus Presiden RI Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, menjadi salah satu contoh nyata dari tantangan komunikasi publik di era digital. Pada acara Magelang Bersholawat, 20 November 2024, Miftah melontarkan candaan yang mengandung umpatan kepada Sunhaji, seorang pedagang es teh keliling. Ujaran tersebut dinilai tidak pantas dan memicu respons negatif meluas dari warganet. Nama "Miftah" bahkan masuk urutan kedua trending topic di media sosial X pada 4 Desember 2024 (Basyari, 2024), sebelum akhirnya Miftah mengundurkan diri dari jabatannya pada 6 Desember 2024.

Kasus ini menyoroti kompleksitas komunikasi publik ketika pesan yang disampaikan harus memperhatikan norma sosial, konteks khalayak, dan implikasi yang mungkin timbul. Kritik publik terhadap Miftah Maulana berfungsi sebagai mekanisme koreksi sosial atas tindakan yang dianggap bertentangan dengan ekspektasi moral masyarakat. Lebih dari itu, kasus ini mendemonstrasikan bagaimana narasi digital dapat membangun dan menghancurkan reputasi seseorang dalam waktu singkat.

Studi jaringan komunikasi memetakan hubungan antara aktor dalam struktur sosial tertentu. Dalam kerangka Teori Jaringan Aktor (Actor-Network Theory/ANT), jaringan sosial tidak hanya dibentuk oleh aktor manusia, tetapi juga oleh aktor non-manusia yang saling memengaruhi (Latour, 2005). Dalam kasus ini, aktor manusia—seperti Miftah, Sunhaji, dan warganet—terhubung melalui aktor non-manusia berupa media sosial, video viral, algoritma platform, dan norma sosial yang membentuk pola interaksi digital. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media sosial berperan penting dalam membentuk jaringan komunikasi dan mempercepat penyebaran narasi di

ruang digital. Penelitian oleh Suhendra & Pratiwi (2024) menjelaskan bahwa masyarakat jaringan (*network society*) memungkinkan arus informasi bergerak secara cepat melalui relasi antarpengguna dan teknologi digital. Penelitian lain oleh Prasetyo dkk. (2026) menunjukkan bahwa proses mediatization menjadikan platform digital sebagai aktor yang turut memengaruhi pembentukan makna sosial dan opini publik. Selain itu, studi mengenai viralitas di media sosial menunjukkan bahwa narasi yang memiliki resonansi emosional dan relevansi sosial cenderung lebih mudah menyebar dan diterima publik (Migotuwio et al., 2025). Sementara itu, Paradigma Naratif memberikan kerangka untuk memahami mengapa narasi tertentu diterima lebih luas dibandingkan narasi lainnya melalui konsep *narrative probability* dan *narrative fidelity*. Wagnsson dan Lundström (2023) menemukan bahwa narasi tetap dapat bersifat persuasif meskipun audiens tidak memiliki pengalaman langsung terhadap isu tertentu atau ketika narasi tidak sepenuhnya koheren. Hal ini menunjukkan bahwa konstruksi dan penyebaran narasi menjadi faktor penting dalam membentuk penerimaan publik di ruang digital (Wagnsson & Lundström, 2023). Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti jaringan komunikasi digital atau viralitas secara umum, penelitian ini secara khusus menganalisis keterhubungan aktor manusia dan non-manusia dalam konstruksi narasi viral pada kasus Miftah–Sunhaji, serta menjelaskan bagaimana narasi tersebut memperoleh legitimasi di ruang digital melalui kombinasi pendekatan ANT dan Paradigma Naratif.

Dengan memadukan ANT dan Paradigma Naratif, penelitian ini bertujuan menganalisis: (1) peran aktor manusia dan non-manusia dalam membentuk respons publik terhadap kasus penghinaan penjual es teh; (2) bagaimana koherensi dan fidelitas narasi memengaruhi penerimaan publik; dan (3) implikasi kasus ini bagi etika komunikasi publik di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penulis menggali informasi secara mendalam melalui pengamatan terhadap ucapan, tulisan, dan perilaku (Ruslan, 2013). Denzin & Lincoln (2017) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif memungkinkan interpretasi fenomena berdasarkan makna yang dikonstruksi manusia dalam kondisi alamiah. Metode studi kasus digunakan untuk menganalisis fenomena secara mendalam dalam konteks dunia nyata (Yin, 2018), yang dalam hal ini adalah kasus penghinaan penjual es teh oleh Miftah Maulana pada November–Desember 2024.

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari sumber-sumber sekunder, meliputi artikel jurnal ilmiah, buku teks, laporan media nasional (Kompas.id, CNN Indonesia, Tempo.co), dan diskusi publik di platform media sosial yang relevan. Pemilihan sumber didasarkan pada relevansi dengan peristiwa yang dikaji serta kredibilitas media yang mempublikasikannya.

Analisis data dilakukan menggunakan dua kerangka teoretis yang saling melengkapi: (1) Teori Jaringan Aktor (*Actor-Network Theory/ANT*) oleh Bruno Latour untuk menganalisis hubungan dinamis antara aktor manusia dan non-manusia dalam jaringan komunikasi digital; dan (2) Paradigma Naratif Walter Fisher untuk mengevaluasi koherensi dan fidelitas narasi yang berkembang di masyarakat. Triangulasi teoretis ini bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh dan analitis tentang bagaimana jaringan aktor dan narasi berinteraksi dalam membentuk opini publik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kasus

Kasus ini bermula pada acara Magelang Bersholawat di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Rabu 20 November 2024. Miftah Maulana yang hadir sebagai pendakwah terlibat interaksi dengan Sunhaji, seorang penjual es teh. Ketika sejumlah jamaah meminta Miftah membeli dagangan Sunhaji, ia merespons dengan ucapan yang mengandung umpatan: "Es teh masih ada nggak? Kalau ada, jual aja, goblok. Jual dulu, nanti kalau nggak laku, ya sudah, itu takdir!" (CNN Indonesia, 2024).

Kejadian tersebut terekam dalam video berdurasi singkat yang kemudian viral di media sosial. Respons publik mengalir deras mengecam ucapan Miftah sebagai tidak pantas dan bertentangan dengan etikanya sebagai tokoh agama sekaligus pejabat pemerintah. Protes turut muncul dari Partai Gerindra yang menilai ucapan tersebut bertentangan dengan prinsip Presiden Prabowo Subianto yang sangat menghormati pedagang kecil.

Pada 4 Desember 2024, Miftah meminta maaf melalui video dan mengunjungi kediaman Sunhaji. Namun, gestur Miftah saat bertemu Sunhaji dinilai publik kurang tulus. Kontroversi semakin meluas ketika beredar video lama Miftah yang dianggap merendahkan seniman Yati Pesek dan ceramah dengan unsur pelecehan seksual. Tekanan publik meningkat hingga muncul petisi yang mendesak Presiden Prabowo mencabut jabatan Miftah. Pada 6 Desember 2024, Miftah menyatakan pengunduran dirinya dalam konferensi pers, yang kemudian diapresiasi oleh Presiden Prabowo sebagai sikap kesatria (Wicaksono, 2024).

Teori Jaringan Aktor (*Actor-Network Theory*)

Teori Jaringan Aktor atau *Actor-Network Theory* (ANT) adalah pendekatan analitis yang memandang dunia sebagai jaringan kompleks dari hubungan antara aktor manusia maupun non-manusia. ANT berpendapat bahwa sains dan teknologi dibentuk oleh konteks sosial lokal tertentu, sehingga peran media atau teknologi tidak dapat dipandang secara general tanpa mempertimbangkan konteks jaringannya (Schroeder, 2024). Latour (2005) mendefinisikan aktor sebagai entitas apa pun yang mampu memengaruhi tindakan pihak lain, tanpa terbatas pada manusia saja.

Dalam kerangka ANT, terdapat beberapa konsep kunci yang saling berkaitan:

1. Aktor, yakni entitas—baik manusia maupun non-manusia—yang mampu memengaruhi jaringan. Aktor dapat berperan aktif maupun pasif dalam membentuk hubungan dan menggerakkan proses dalam jaringan.
2. Jaringan, yaitu struktur dinamis yang mengintegrasikan aktor melalui interaksi sosial, politik, dan teknis. Jaringan bersifat non-hierarkis dan memberikan peran setara kepada setiap elemen.
3. Simetri Umum, yakni prinsip kesetaraan antara aktor manusia dan non-manusia dalam analisis. Latour menolak dikotomi antara subjek dan objek, sehingga teknologi diperlakukan setara dengan manusia dalam jaringan.
4. Mediasi, di mana aktor non-manusia berperan sebagai mediator aktif yang mengubah hubungan antar aktor—bukan sekadar alat pasif.
5. Penerjemahan (Translation), yaitu proses penyelarasan kepentingan berbagai aktor dalam jaringan untuk membangun stabilitas narasi dan mencapai tujuan bersama.
6. Aksi Jarak Jauh, yaitu kemampuan aktor untuk memengaruhi pihak lain meskipun terpisah secara geografis, dimungkinkan oleh teknologi komunikasi digital.

Terkait tahapan perilaku jaringan, Latour (dalam Oktavianti, 2016) mengidentifikasi lima tahap, yaitu: (1) Problemization, ketika aktor menyatakan masalah bersama dengan aliansi potensial; (2) Interessement, saat aktor focal meyakinkan aliansi dengan sumber daya yang diperlukan; (3) Enrollment, ketika aliansi bergabung dalam jaringan melalui proses translasi; (4) Mobilization, tahap aktor yang telah bergabung memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah; dan (5) Inscription, di mana jaringan menanamkan script untuk tindakan di masa depan.

Manuel Castells (2009) memperlengkapi perspektif ini dengan konsep masyarakat jaringan, yang menggambarkan struktur sosial berbasis jaringan komunikasi. Dalam masyarakat jaringan, ruang mengambil bentuk "ruang arus" (*space of flows*) yang memungkinkan simultanitas interaksi tanpa kedekatan fisik, sebuah kondisi yang sangat relevan untuk memahami bagaimana opini publik terbentuk secara masif di media sosial.

Paradigma Naratif

Walter Fisher (1987) mengemukakan Paradigma Naratif berdasarkan gagasan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita (*homo narrans*). Menurut Fisher, nilai-nilai, emosi, dan pertimbangan estetika mendasari kepercayaan dan perilaku manusia, bukan sekadar logika formal. Paradigma ini menawarkan kerangka kerja konseptual (*conceptual framework*) untuk memahami bagaimana manusia mengevaluasi dan menerima pesan-pesan komunikasi.

Terdapat lima asumsi utama dalam Paradigma Naratif Fisher (1987): (1) semua manusia adalah pencerita; (2) keputusan didasarkan pada *good reasons* yang sangat bergantung pada situasi komunikasi, media, dan genre; (3) sejarah, biografi, budaya, dan karakter menentukan *good reasons*; (4) rasionalitas naratif ditentukan oleh koherensi dan fidelitas cerita; dan (5) dunia adalah seperangkat cerita yang kita pilih.

Dua konsep kunci dalam paradigma ini adalah koherensi dan fidelitas. Koherensi mengacu pada kesesuaian internal bagian-bagian narasi—konsistensi karakter, aksi, dialog, dan latar (Dainton & Zelley, 2018). Fidelitas berkaitan dengan nilai kebenaran cerita: apakah narasi tersebut sesuai dengan pengalaman audiens dan pandangan mereka tentang penalaran yang baik. Fisher menetapkan lima kriteria fidelitas: (a) nilai-nilai yang tertanam dalam cerita; (b) hubungan antara cerita dan nilai-nilai yang dianut audiens; (c) hasil yang mungkin diperoleh dari mengikuti nilai tersebut; (d) konsistensi nilai narasi dengan nilai pengamat; dan (e) sejauh mana nilai cerita mewakili kemungkinan nilai tertinggi dalam pengalaman manusia (Fisher, 1987).

Etika Komunikasi dan Budaya Pembatalan

Etika komunikasi secara historis berakar pada pendidikan publik Amerika awal abad ke-20 dan berkembang seiring tuntutan demokrasi serta kebutuhan melawan retorika manipulatif (Arnett, 1990). Pada era kontemporer, perhatian beralih ke etika dalam diskursus politik dan ruang publik, dengan pengaruh dari teori diskursus Habermas dan tradisi neo-Aristotelian.

Timothy Garton Ash mengembangkan sepuluh prinsip kebebasan berbicara di dunia yang semakin terkoneksi, antara lain: *Lifeblood* (kebebasan menyampaikan dan menerima informasi), *Violence* (larangan ancaman kekerasan), *Diversity* (ekspresi perbedaan secara saling menghormati), *Privacy* (perlindungan privasi yang seimbang dengan kepentingan publik), dan *Courage* (keberanian menanggung konsekuensi atas ujaran) (Ash, 2024). Prinsip-prinsip ini menjadi relevan dalam mengevaluasi dimensi etis kasus Miftah.

Sementara itu, *cancel culture* atau budaya pembatalan merujuk pada praktik sosial berupa pemberian sanksi sosial kolektif terhadap individu, kelompok, atau institusi melalui kritik publik, boikot, penarikan dukungan, maupun eksklusi sosial akibat tindakan, pernyataan, atau perilaku yang dianggap melanggar norma sosial tertentu (Sculos, 2022). Fenomena ini berkembang pesat dalam ekosistem digital karena media sosial memungkinkan penyebaran opini, mobilisasi massa, dan penguatan respons kolektif dalam waktu singkat. Pendukung *cancel culture* memandang praktik ini sebagai bentuk akuntabilitas sosial yang memungkinkan masyarakat memberikan konsekuensi terhadap perilaku yang dianggap merugikan atau tidak etis. Namun, para kritikus menilai bahwa praktik tersebut berpotensi menghasilkan penghakiman massal, polarisasi, serta membatasi ruang dialog dan kebebasan berekspresi. Dalam konteks komunikasi digital, *cancel culture* tidak hanya

merepresentasikan respons publik terhadap suatu tindakan, tetapi juga mencerminkan dinamika kekuasaan dalam masyarakat digital, di mana visibilitas media, opini kolektif, dan tekanan sosial berinteraksi dalam membentuk legitimasi maupun delegitimasi terhadap aktor tertentu.

PEMBAHASAN

Analisis Jaringan Aktor (ANT)

Berdasarkan perspektif ANT, kasus penghinaan penjual es teh mengungkap jaringan kompleks yang melibatkan aktor manusia dan non-manusia secara setara. Aktor manusia dalam jaringan ini meliputi: Miftah Maulana sebagai aktor sentral yang memicu kontroversi; Sunhaji sebagai korban sekaligus simbol solidaritas; warganet sebagai kolektivitas yang mendorong tekanan publik; pejabat pemerintah dan tokoh politik sebagai responder institusional; serta media massa sebagai penguat narasi.

Adapun aktor non-manusia mencakup: (1) Media Sosial, yang tidak hanya berfungsi sebagai medium komunikasi tetapi juga sebagai agen amplifikasi konten viral; (2) Algoritma Media Sosial, yang menentukan konten mana yang diprioritaskan berdasarkan tingkat keterlibatan pengguna, sehingga berperan sebagai "pengendali tidak kasat mata" dalam jaringan; (3) Video Ceramah, sebagai artefak yang membawa konteks visual dan emosional, memungkinkan publik menginterpretasikan narasi secara instan; dan (4) Norma Sosial, sebagai pengukur utama penerimaan narasi dan landasan moral opini publik.

Analisis tahapan ANT menunjukkan pola yang sistematis. Pada tahap *Problemization*, pernyataan Miftah mendefinisikan masalah yang dianggap mencerminkan ketimpangan sosial, menciptakan fokus pada isu moral dan keadilan. Pada tahap *Interessement*, algoritma media sosial mengarahkan perhatian pada narasi "korban" dengan memprioritaskan konten yang relevan, sehingga warganet, media, dan Sunhaji terbentuk sebagai aliansi yang solid.

Tahap *Enrollment* melibatkan integrasi berbagai aktor melalui penerjemahan kepentingan. Video ceramah menjadi simbol kuat yang memvalidasi narasi solidaritas, membuat jaringan semakin stabil dan terkoordinasi. *Mobilization* terjadi ketika warganet menggerakkan opini publik secara masif, menciptakan tekanan yang akhirnya mendorong pengunduran diri Miftah. *Inscription* kemudian menanamkan preseden bahwa tindakan pejabat publik akan senantiasa dinilai dengan standar moral tinggi oleh masyarakat digital.

Prinsip simetri umum ANT relevan dalam kasus ini: media sosial, algoritma, dan video ceramah diperlakukan setara dengan Miftah, Sunhaji, dan warganet sebagai elemen penting dalam jaringan. Konsep aksi jarak jauh juga termanifestasi nyata, di mana media sosial memungkinkan aktor yang terpisah secara geografis untuk menghasilkan dialog publik dan tekanan kolektif secara real-time. Merujuk pada konsep Castells (2009), media sosial bertindak sebagai "ruang arus" yang

memfasilitasi simultanitas interaksi tanpa kedekatan fisik, menggambarkan bagaimana komunikasi memungkinkan penyelarasan tujuan antara warganet dan norma sosial untuk membentuk tekanan kolektif terhadap Miftah.

Analisis Paradigma Naratif Fisher

Paradigma Naratif Fisher membantu menjelaskan mengapa narasi Sunhaji sebagai korban diterima secara luas, sementara klarifikasi Miftah gagal menciptakan resonansi. Narasi ketidakadilan terhadap Sunhaji memenuhi prinsip koherensi karena struktur ceritanya sederhana, konsisten, dan mencerminkan hierarki sosial yang familiar bagi khalayak: seorang pejabat publik yang menghina pedagang kecil.

Fidelitas narasi semakin menguat karena nilai-nilai yang diangkat—penghormatan terhadap individu yang lemah, keadilan sosial, dan martabat sebagai warga negara—sesuai dengan pengalaman hidup dan sistem nilai masyarakat luas. Lima kriteria fidelitas Fisher terpenuhi: nilai penghormatan dan keadilan tertanam kuat dalam narasi, sesuai dengan nilai yang dianut khalayak, menghasilkan solidaritas sebagai respons yang logis, konsisten dengan pandangan moral publik, dan merepresentasikan nilai tertinggi dalam hubungan antarmanusia.

Sebaliknya, narasi pembelaan Miftah gagal memenuhi uji koherensi dan fidelitas. Gestur permintaan maafnya dinilai kurang tulus oleh publik, menciptakan inkonsistensi antara pernyataan verbal dan perilaku nonverbal. Narasi tandingan ini tidak mampu menjawab pertanyaan moral publik yang fundamental, yakni: apakah seorang pejabat publik berhak merendahkan warga biasa? Kegagalan ini diperparah oleh munculnya video-video lama yang memperkuat persepsi publik tentang pola perilaku Miftah.

Dalam konteks ini, media sosial berfungsi sebagai arena verifikasi kolektif narasi berdasarkan kesesuaiannya dengan nilai komunitas. Publik mengevaluasi moralitas narasi secara spontan melalui komentar dan reaksi, menjadikan budaya digital sebagai ruang etika yang responsif dan dinamis. Pola ini mempertegas tantangan bagi pejabat publik untuk tidak hanya membangun narasi yang koheren, tetapi juga secara strategis mencerminkan fidelitas bagi khalayak yang beragam.

Implikasi Etika Komunikasi dan *Cancel Culture*

Ditinjau melalui prisma sepuluh prinsip kebebasan berbicara Garton Ash, etika komunikasi Miftah mengandung beberapa pelanggaran signifikan. Prinsip *Diversity* dilanggar karena sindirannya terhadap Sunhaji tidak memenuhi standar ekspresi perbedaan yang saling menghormati—bahkan secara eksplisit merendahkan kelompok yang lebih rentan secara sosial-ekonomi. Prinsip *Courage* juga baru dipenuhi secara terlambat melalui permintaan maaf yang dipersepsi publik tidak cukup tulus.

Firman Noor dari BRIN (dalam Basyari 2024) menegaskan bahwa sebagai pejabat publik yang dibiayai uang rakyat, Miftah seharusnya menyadari bahwa kebebasan berbicaranya kini dibatasi oleh tanggung jawab kepada masyarakat luas. Pejabat publik harus belajar menyesuaikan cara berbicara agar relevan bagi semua kalangan, bukan hanya segmen atau kelompok tertentu.

Sementara itu, *cancel culture* dalam kasus ini memperlihatkan dua dimensi yang berlapis. Pertama, sebagai mekanisme akuntabilitas sosial yang efektif: tekanan kolektif warganet berhasil mendorong pertanggungjawaban nyata berupa pengunduran diri. Kedua, sebagai cerminan ekspektasi moral masyarakat digital yang semakin tinggi terhadap pejabat publik. Namun, perlu dicermati pula bahwa tekanan publik yang melampaui batas dapat mengarah pada pelanggaran prinsip *Violence*—ketika kritik berubah menjadi serangan pribadi—sebuah dinamika yang juga perlu dikritisi dalam analisis *cancel culture* (Sculos, 2022).

Kasus ini menggarisbawahi perlunya literasi digital di kalangan pejabat publik. Kasus ini menggarisbawahi perlunya literasi digital di kalangan pejabat publik. Komunikasi publik di era digital tidak lagi sekadar transfer informasi, melainkan navigasi yang kompleks dalam jaringan narasi, norma, dan ekspektasi moral yang berkembang di ruang digital. Oleh karena itu, literasi digital perlu diimbangi dengan penerapan etika komunikasi, karena pejabat publik tidak hanya dituntut mampu menyampaikan informasi secara efektif, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab moral, sensitivitas sosial, serta dampak dari pesan yang disampaikan kepada publik. Penelitian Maulan & Fitriani (2025) menunjukkan bahwa transparansi digital memiliki pengaruh signifikan terhadap kepercayaan publik ($\beta = 0,624$), yang kemudian berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat. Temuan ini mengindikasikan bahwa kompetensi digital dan praktik komunikasi yang etis menjadi faktor penting dalam membangun legitimasi, menjaga reputasi institusi, dan memperkuat kepercayaan publik di era digital. Dalam konteks kasus Miftah Maulana, dinamika yang muncul memperlihatkan bahwa aktor publik tidak lagi beroperasi dalam ruang komunikasi yang linear, melainkan berada dalam jaringan aktor yang saling terhubung antara manusia dan non-manusia, di mana video viral, algoritma media sosial, serta respons kolektif warganet turut membentuk persepsi publik. Dengan demikian, kemampuan memadukan komunikasi yang responsif, akurat, empatik, dan etis menjadi elemen krusial bagi pejabat publik dalam mengelola komunikasi di ruang digital, terutama ketika narasi yang berkembang dapat dengan cepat memproduksi legitimasi maupun tekanan sosial secara luas.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus penghinaan terhadap penjual es teh oleh Miftah Maulana merupakan fenomena komunikasi publik digital yang dapat dipahami secara komprehensif melalui kombinasi Teori Jaringan Aktor (ANT) dan Paradigma Naratif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa jaringan aktor yang terbentuk melibatkan interaksi antara aktor manusia—seperti Miftah, Sunhaji, warganet, dan pejabat pemerintah—dengan aktor non-manusia berupa video viral, algoritma media sosial, dan norma sosial yang bekerja secara simultan dalam membentuk dinamika komunikasi publik. Dalam jaringan tersebut, media sosial berfungsi sebagai medium amplifikasi sekaligus arena pembentukan opini, sementara algoritma berperan dalam menentukan dominasi dan persebaran narasi di ruang digital. Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas narasi di era digital ditentukan oleh kemampuannya memenuhi koherensi dan kesesuaian dengan nilai yang diyakini audiens, di mana narasi solidaritas terhadap Sunhaji lebih mudah diterima karena selaras dengan nilai penghormatan dan keadilan sosial yang berkembang di masyarakat, sedangkan klarifikasi Miftah kurang mampu menghasilkan resonansi moral karena dipersepsikan tidak memenuhi ekspektasi publik. Selain itu, fenomena *cancel culture* dalam kasus ini menunjukkan adanya pergeseran ekspektasi masyarakat terhadap tanggung jawab moral pejabat publik, di mana setiap tindakan dan ujaran semakin rentan terhadap evaluasi kolektif dalam ruang digital. Temuan ini menegaskan bahwa literasi digital dan etika komunikasi menjadi kompetensi penting bagi pejabat publik untuk menavigasi kompleksitas jaringan komunikasi digital serta meminimalkan risiko kegagalan komunikasi yang dapat berdampak pada legitimasi, reputasi, dan posisi sosial mereka.

SARAN

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan data sekunder, sehingga penelitian lanjutan dengan wawancara mendalam maupun analisis kuantitatif media sosial diperlukan untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika jaringan komunikasi digital pada kasus serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnett, R. C. (1990). The practical philosophy of communication ethics and free speech as the foundation for speech communication. *Communication Quarterly*, 38(3), 208–218.
<https://doi.org/10.1080/01463379009369758>
- Ash, T. G. (2024). 10 principles. Free Speech Debate. *Diakses Pada Desember*.
<https://freespeechdebate.com/>
- Basyari, I. (2024). 4 Desember). Kelakar Gus Miftah dan etika bicara pejabat publik. *Kompas.Id*.
<https://www.kompas.id/artikel/kelakar-gus-miftah-dan-etika-bicara-pejabat-publik>
- Castells, M. (2009). *Communication power*. Oxford University Press.
- CNN Indonesia. (2024). *Kronologi Miftah mundur dari Utusan Khusus Prabowo usai hina tukang es*.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241206192628-20-1174645/kronologi-miftah-mundur-dari-utusan-khusus-prabowo-usai-hina-tukang-es>

Jaringan Aktor dalam Komunikasi Publik Era Digital pada Kasus Penghinaan Penjual Es Teh oleh Miftah Maulana

- Dainton, M., & Zelley, E. D. (2018). *Applying communication theory for professional life: A practical introduction* (4th ed.). SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2017). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Fisher, W. R. (1987). *Human communication as narration: Toward a philosophy of reason, value, and action*. University of South Carolina Press.
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford University Press.
- Maulan, P. A., & Fitriani, N. (2025). E-Government and public trust: examining the impact of digital transparency on citizen engagement in Southeast Asia. *Dinamika: Jurnal Manajemen Sosial Ekonomi*, 5(1), 242–252.
- Migotuwio, N., Giovanni, T. A., & Prayogi, R. (2025). Instrumentasi Viralitas Pada Konten Digital Marketing. *Jurnal Sains Informatika Terapan*, 4(2), 118–128.
- Oktavianti, R. (2016). *Jaringan aktor dalam jaringan komunikasi termediasi teknologi: Studi kasus pengumpulan berita komunitas jurnalis kepresidenan Republik Indonesia*. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20432376>
- Prasetyo, P., Olifia, S., & Judijanto, L. (2026). *Pengantar Komunikasi Media Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Primaresti, F., Murdiana, R., Yasmin, P. A., & Chaerani, T. (2022). Jaringan aktor dan konflik peran dalam isu rasisme Papua. *Jurnal Polgov*, 4(2). <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i2.3641>
- Ruslan, R. (2013). *Metode penelitian: Public relations & komunikasi*. Rajagrafindo Persada.
- Schroeder, R. (2024). *The internet in theory. Dalam Social theory after the internet: Media, technology, and globalization*. UCL Press. <https://doi.org/10.2307/j.ctt20krxdr.4>
- Schwarz, B. B., Tsemach, U., Israeli, M., & Nir, E. (2024). Actor-network theory as a new direction in research on educational dialogues. *Instructional Science*, 1–29. <https://doi.org/10.1007/s11251-024-09669-5>
- Sculos, B. W. (2022). The comedy of cancel culture in a post-Carlin United States. *Class, Race and Corporate Power*, 10(2), 1–10.
- Suhendra, S., & Pratiwi, F. S. (2024). Peran komunikasi digital dalam pembentukan opini publik: Studi kasus media sosial. *Iapa Proceedings Conference*, 293–315.
- Wagnsson, C., & Lundström, M. (2023). Ringing true? The persuasiveness of Russian strategic narratives. *Media, War & Conflict*, 16(3), 383–400.
- Wicaksono, P. (2024). 7 Desember). Miftah Maulana mundur setelah mengolok penjual es teh, PBNU dan Muhammadiyah beri tanggapan. <https://www.tempo.co/politik/miftah-maulana-mundur-setelah-mengolok-penjual-es-teh-pbnu-dan-muhammadiyah-beri-tanggapan-1178484>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.